

TRANSMIGRASI ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

*La Pona**

ABSTRACT

Transmigration program was stopped in Papua in 2001. Some societies have consider that this program has failed to improve the local people life, prosperity, and tend to make social, cultural and political problems. Debating about the continuity of this program is still going on until now, even though, this program is still sustainable based on the ordinance of special autonomy in Papua Province. In the period of special autonomy, the implementation of transmigration program has been based on regulation territory of Papua province, and depends on the contribution of social and cultural scientists, because some of the most crucial problems of this program are social integration, social interaction, and social networking problems which have become barriers for diffusion and adoption of agricultural inovation process to indigenous people. The social and cultural planning in the past did not develop social networking to support the diffusion and inovation adoption proces. This is the challenge for social and cultural scientists in this state to produce the new social and cultural approach, strategy, policy, program, and action. This contribution is very important in the interest of the state.

Key Words: perkembangan, transmigrasi, masalah sosial, jaringan sosial, difusi, inovasi serapan, adopsi inovasi

PENGANTAR

Sejak program transmigrasi dimulai di Papua pada era pra-Pelita s.d. Pelita VII (\pm 30 tahun) sudah ditempatkan transmigran (lokal dan daerah asal) sebanyak 78.650 kepala keluarga (KK) (306.447 jiwa) dalam 270 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) tersebar di seluruh tanah Papua (Dinas Kependudukan & Permukiman Provinsi Papua, 2008). Program ini "berakhir" di Papua pada penempatan trans-migran periode tahun 1999-2000, yaitu se-banyak 650 KK atau 2884 jiwa, di antaranya; di Manokwari (Teluk Bintuni) di Babo (200KK= 910 jiwa), di Kerom (Arso 14) yaitu 100 KK (421 jiwa), Merauke (Muting 10) 100 KK (499 jiwa), Mimika, di lokasi Timika 13 (Bintuka) 250 KK (1054 jiwa). Penempatan transmigran terakhir ini bagi kalangan yang

menentang program transmigrasi di Papua disebut sebagai trans-migran "siluman", *illegal*, dan disusupkan lem-baga khusus negara, padahal sudah direncana-kan secara resmi sebagaimana penempatan transmigran sebelumnya. Dinamika sosial-politik daerah mempengaruhi dihentikannya program transmigrasi di tanah Papua karena mendapat penolakan dari beberapa kalangan dan terus meningkat saat eforia reformasi politik dan tuntutan kemerdekaan bangsa Papua sekitar tahun 1999/2000 karena dinilai tidak memberikan banyak manfaat dan/ atau kesejahteraan kepada orang asli, tanpa terlalu memperhitungkan dampak positifnya bagi pembangunan daerah ini.

Program nasional ini sesungguhnya telah memberikan kontribusi penting bagi pem-

* Staf Pengajar Universitas Cendrawasih

bangunan daerah dan nasional, sekaligus dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat setempat. Secara demografis, program ini telah mempengaruhi jumlah, karakteristik, komposisi, dan struktur penduduk Papua. Perubahan kependudukan disikapi secara beragam dan menimbulkan persoalan sosial multidimensional, multikompleks, dan multipersepsi di kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Program ini sejak awal memunculkan pro dan kontra dengan berbagai motif, alasan, pertimbangan dan tujuan. Menyangkut manfaatnya menjadi bahan perbincangan dan perdebatan, terutama bagi perbaikan kehidupan orang asli. Program transmigrasi masuk dalam pusaran pergulatan dan dinamika politik Papua, antara menolak keras atau menghentikan sama sekali, atau melaksanakan kembali program nasional ini melalui para-digma dan pendekatan baru. Dan melalui proses politik akhirnya tetap dimasukkan dalam 25 tahun program pembangunan era otonomi khusus Provinsi Papua.

Persoalan utama program transmigrasi diantaranya disebabkan ketidaktepatan pendekatan, strategi, kebijakan, dan program sosial-budaya memantapkan proses integrasi sosial, interaksi sosial, dan keakraban jaringan sosial lintas ras (*race*), suku-bangsa, dan etnik dalam masyarakat majemuk ini, sehingga menghambat proses difusi inovasi budi daya pertanian dari transmigran asal ke translok, mengakibatkan terhambatnya pengembangan budaya pertanian penduduk asli, lambatnya perbaikan kehidupan penduduk asli, penduduk asli tidak banyak mendapatkan manfaat ekonomi, pandangan negatif terhadap transmigran asal, penolakan terhadap program ini, dan memunculkan persoalan sosial, politik dan keamanan. Disisi lain bekas lokasi-lokasi transmigrasi kini telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*growth center*), peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, menjadi lumbung makanan masyarakat perkotaan, pembentukan pusat pemerintahan otonomi baru, sebagai sabuk pengamanan daerah perbatasan negara RI & PNG, serta pemantapan pertahanan dan ketahanan nasional di daerah ini.

UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada bab XVIII, pasal 61, ayat (3) dan (4) mengatur program transmigrasi. Konsekuensinya, program ini harus dilaksanakan kembali setelah mendapat persetujuan gubernur dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua. Rancangan (*draft*) Perdasi Kependudukan (transmigrasi) tersebut kini (2009) dalam proses pembahasan di lembaga DPR Papua. Pembahasan pasal-pasal transmigrasi yang sangat krusial dan mendapat perhatian adalah bagaimana menetapkan suatu pendekatan, strategi, kebijakan, dan program perencanaan sosial dan budaya supaya dapat mengatasi persoalan sosial-budaya masyarakat majemuk (*plural society*) di lokasi transmigrasi karena pola dan model lama dinilai gagal dan/atau kurang berhasil, sekaligus kegagalan para ilmuwan sosial dan budaya ketika itu. Penyamaan pola dan model penempatan, pembinaan, dan perlakuan transmigran asal dan lokal (orang asli) misalnya menjadi salah satu kesalahan utama.

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mengemukakan kondisi program transmigrasi di Papua, (2) menganalisis permasalahan sosial dan budaya program transmigrasi, (3) menganalisis kegagalan perencanaan sosial-budaya mengatasi masalah sosial-budaya di lokasi transmigrasi, (4) mengemukakan solusi sosial-budaya program transmigrasi, (5) mengemukakan pentingnya perencanaan sosial-budaya mendukung transmigrasi era Otsus Papua, dan (6) mengemukakan perlunya pengembangan jaringan sosial dalam mendukung proses difusi dan adopsi inovasi budi daya pertanian penduduk asli.

PERMASALAHAN SOSIAL DAN BUDAYA TRANSMIGRASI (FAKTA & TEORI)

Hambatan utama pembangunan transmigrasi di Papua selama ini di antaranya adalah permasalahan sosial yang terjadi antara transmigran daerah asal (Jawa, Madura, NTT dan NTB) dengan transmigran lokal (penduduk asli) di lokasi transmigrasi. Perbedaan latar belakang sosial dan taraf budaya kedua masyarakat me-

nyebabkan masyarakat asli (translok) cenderung menjadi marginal atau terkalahkan dalam proses perbaikan kesejahteraan sehingga membuat rasa frustrasi, rasa tidak senang/suka, iri hati, dan cemburu penduduk asli terhadap transmigran asal, selain pula akibat dipolitisasi beberapa pihak untuk berbagai kepentingan. Terbentuknya masyarakat majemuk ini memunculkan persoalan sosial. Furnival (1967) mengemukakan masyarakat majemuk sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih tertip sosial, komunitas, atau kelompok yang secara kultural dan ekonomik terpisah satu sama lain, dan memiliki struktur kelembagaan berbeda. Rabushka dan Shepsle (1972) mengemukakan masyarakat majemuk dapat didefinisikan melalui tiga buah parameter berikut: (1) keragaman kultural, (2) aliansi etnik, dan (3) terorganisasi secara politik. Masyarakat majemuk pada umumnya memang menghadapi masalah integrasi dalam *maqtitude* yang tidak pernah dihadapi corak masyarakat yang lain.

Integrasi sosial dalam masyarakat majemuk ini memang belum tercapai sesuai dengan tujuan, tetapi tetap harus diupayakan sebagaimana dikemukakan Nasikun (1992) bahwa masyarakat yang multietnik dan multikultural bukan hanya merupakan sumber awal dari bangunan kehidupan bangsa dan negara republik ini, tetapi juga merupakan tantangan masa depan masyarakat Indonesia yang harus kita menangkan jikalau kita benar-benar ingin membangun landasan integrasi nasional yang kokoh. Kemampuan untuk mengakomodasi pluralisme merupakan fondasi yang sangat esensial bagi integrasi masyarakat kita sebagai bangsa, demikian maka kemampuan mengembangkan perencanaan sosial yang tepat dalam program transmigrasi sangat dibutuhkan. Penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan (kekerasan) selama ini harus segera ditinggalkan karena hanya akan menyemaikan benih-benih disintegrasi bangsa.

Kurangnya memperhatikan (menghargai) budaya orang asli Papua dalam lokasi transmigrasi menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan sosial budaya sebagaimana

dikemukakan Nasikun (1999) bahwa upaya memperhatikan dan menghargai unsur dan nilai budaya atau hukum-hukum adat dalam suku-suku bangsa, merupakan bagian penting dalam membangun integrasi sosial sehingga sistem dan nilai budaya masyarakat yang multi-etnik dan multikultural itu perlu diperhatikan dan diakomodasi secara baik dalam proses pembangunan. Pengabaian akan adanya nilai dan sistem sosial budaya masyarakat akan merupakan determinan integrasi sosial. Menurut Horowitz (1985) perbedaan sistem nilai dan norma budaya yang terlalu besar akan menyebabkan titik temu untuk konsensus norma pun semakin sulit, demikian sebaliknya. Proses integrasi sosial itu bermula dari adanya kesempatan untuk berkomunikasi. Potensi untuk bersatu dan bekerja sama ada dalam tiap-tiap hubungan antarsuku-suku bangsa dan dipengaruhi oleh faktor bahasa, komunikasi, dan kegiatan kemasyarakatan. Di sinilah perencanaan sosial-budaya yang tepat sangat dibutuhkan.

Para ilmuwan dinilai belum mampu mendalami sumber spesifik keresahan sosial dan konflik di setiap lokasi transmigrasi Papua walaupun Kustadi (1983) mengemukakan keresahan dan konflik umumnya disebabkan perebutan sumber daya alam, kesempatan ekonomi, sumber kehidupan, dan adanya stereotip etnik. Koentjaraningrat (1982) mengemukakan bahwa stereotip etnik adalah pendapat yang dianut mengenai suatu kelompok individu atau objek sehingga menimbulkan masalah dalam berkomunikasi dan dapat memberikan kesan yang tidak tepat sehingga menghambat proses integrasi sosial. Yahya (1983) mengemukakan timbulnya sumber konflik antarsuku-bangsa disebabkan oleh: (1) dua atau lebih suku bersaing dalam mendapatkan matapencaharian yang sama, (2) warga dari satu suku mencoba memaksakan unsur kebudayaannya, kepada warga dari suku lain, (3) warga dari satu suku-bangsa mencoba melaksanakan konsep agamanya, (4) warga dari satu suku-bangsa mencoba melaksanakan konsep-konsep politiknya, dan (5) adanya permusuhan secara adat atau tradisi antarkelompok masyarakat. Guinness

(1982) dan Cohen (1969) mengemukakan perebutan hegemoni sistem sosial budaya, terjadi ketika suatu kelompok mencoba melegitimasi kekuasaannya terhadap kelompok lainnya, dan menyangkut daya tampung sosial yaitu kemampuan objektif suatu daerah dalam menerima arus transmigran, tanpa menimbulkan ketegangan atau gangguan sosial yang berarti.

Sumber konflik sesungguhnya berbeda-beda di setiap lokasi transmigrasi sehingga pengelolaan (penanganannya) perlu dibedakan. Menurut Coser (1972), konflik dapat muncul karena perbedaan ideologi, nilai agama, dan orientasi politik antarkelompok masyarakat dapat menjadi penghambat dalam proses integrasi sosial. Menurut Weber (1978), konflik antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat biasanya muncul karena faktor pelaksanaan kebijakan tertentu. Bahwa pertimbangan terhadap aspirasi masyarakat, usaha persuasif, dan pembangunan sarana sosial yang seimbang perlu diperhatikan untuk tercipta proses integrasi sosial dalam masyarakat majemuk ini. Sepanjang persoalan sosial masih mengemuka dalam lokasi transmigrasi di Papua maka menunjukkan perencanaan sosial kurang tepat dan belum berhasil sebagaimana diharapkan, misalnya belum adanya perencanaan sosial guna meningkatkan interaksi sosial masyarakat majemuk, sebagaimana ditemukan di banyak lokasi transmigrasi.

Interaksi sosial lintas ras, suku-bangsa, ke-daerahan, dan agama harus mendapat perhatian utama di Papua. Soekanto (1986) mengemukakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antardua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial tampak apabila orang per orang dan kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain karena merupakan kunci dari semua kehidupan bersama dan tidak mungkin terjadi, apabila tidak adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial masyarakat yang multietnik dan multi-kultural tidak selamanya baik. Taneko (1984) mengemukakan bahwa interaksi sosial di-

pengaruhi oleh kebutuhan, harapan, kesempatan, transportasi, kondisi geografis, status sosial, bahasa, etnis, agama, tingkat pendidikan, jarak fisik, dan jarak sosial. Jarak sosial subjektif merupakan persepsi antara kedua belah pihak (asli dan non asli) yang saling menentang. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah ciri khas dari objek stimulus yang terdiri dari objek nilai, pribadi, pengaruh kelompok, budaya, kebutuhan, dan harapan.

Feagin dan Feagin (1978) mengemukakan bahwa masyarakat yang multi-etnik dan multi-kultural dapat menyebabkan adanya penggolongan masyarakat berdasarkan ras (*race*), adat istiadat, kebiasaan, bahasa, agama, warna kulit, bentuk mata, *genetic groups*, dan perbedaan fisik lainnya. Ia pula dapat melahirkan suatu kelompok minoritas atau posisi marginal dan kelompok mayoritas atau kelompok dominan yang lebih mampu dalam sumber daya manusia, ekonomi, budaya, politik, dan hak (*right*) yang kemudian menciptakan klasifikasi sosial dan hirarkis kelompok dalam masyarakat. Apabila kondisi itu tercipta, maka akan dimungkinkan adanya hal-hal yang berbau ras, rasial, prasangka, dan stereotip sehingga menyebabkan adanya persepsi dan perilaku negatif terhadap anggota masyarakat atau kelompok etnik di luar kelompoknya, dan berkaitan dengan adanya etnosentrisme yang biasanya dikembangkan oleh orang-orang yang menjaga nilai, norma, kepercayaan, dan anggota dalam kelompoknya. Prasangka mempengaruhi proses interaksi sosial. Prasangka bergantung kepada karakteristik sosiokultural kedua kelompok etnik dan merupakan bentuk persaingan. Dalam pendekatan *fenomenologis* persepsilah yang menyebabkan terjadinya prasangka dan dalam pendekatan *naïve* menyebabkan apabila etnis tertentu berprasangka terhadap etnis lain, disebabkan faktor-faktor, seperti: sifat malas, kotor, bodoh, merasa kalah, penurunan status, frustrasi, dan merasa tersingkir sehingga akhirnya menimbulkan keresahan dan konflik.

Suasana keresahan dan konflik berlangsung dalam lokasi transmigrasi di Papua (La

Pona, 1999). Sebagaimana pula dikemukakan Kustadi (1983), keresahan dan konflik di daerah transmigrasi sering ditemukan dan membuat proses pembangunan penduduk menjadi terhambat dan umumnya bersumber dari perebutan sumber daya, kesempatan ekonomi, sumber kehidupan penduduk, dan berkaitan dengan motif utama kedatangan transmigran yang bersifat ekonomis. Penduduk asli pun berkepentingan sama, bahkan merasa lebih berhak atas sumber daya alam yang ada, sementara materi yang diperebutkan hanya dari objek ekonomi yang relatif sama. Dalam struktur perekonomian yang masih agraris, tanah menjadi sumber daya utama, objek yang diperebutkan, dan sering menimbulkan masalah. Cohen (1969) mengemukakan sumber konflik lainnya adalah perebutan hegemoni sistem sosial budaya yang berlaku di daerah transmigrasi yang berlangsung ketika suatu kelompok mencoba melegitimasi kekuasaannya terhadap satu kelompok lainnya. Arah legitimasi datang dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, tetapi dalam beberapa hal yang menyangkut jati diri, kelompok subordinatpun berupaya untuk mempertahankan diri.

Sumber-sumber konflik memang beragam, kompleks dan dimensional. Rumbiak & Manning (1989 (La Pona, 1999; Heeren, 1979) menemukan sumber konflik dari hubungan kompetitif antarsistem sosial sering kali berkaitan dengan faktor keterbatasan daya tampung sosial. Sepanjang transmigran yang datang cukup berkualitas dan bervariasi, potensi konflik mungkin dapat diredam karena kreativitas mereka dapat diharapkan untuk memecahkan persoalan yang ada, dan dapat diharapkan tampil sebagai pelengkap bagi kehidupan sosial ekonomi yang telah ada. Apabila kualitas transmigran rendah dan homogen, transmigran cenderung dilihat sebagai pesaing oleh penduduk setempat sehingga akan memperbesar potensi konflik. Koentjaraningrat (1986) mengemukakan bahwa faktor politik ideologi dapat menjadi sumber konflik antara penguasa dengan rakyat. Konflik yang bersumber pada pertentangan ideologi atau agama dapat berlangsung keras dengan implikasi yang luas karena mereka yang terlibat masing-masing

merasa sebagai pembela kebenaran dan pejuang untuk kepentingan orang banyak. Kecenderungan konflik terbuka cenderung lebih besar oleh karena sentimen keagamaan tidak jarang tampil secara tumpang tindih dengan prasangka dan stereotip etnik.

Soetrisno (1986) mengemukakan hubungan sosial penduduk asli dan transmigran yang belum serasi di Irian Jaya (Papua) sering berkembang menjadi isu politik di daerah, sering dikatakan sebagai usaha "kolonisasi", "menjawabkan" dan "meng-Islam-kan" daerah. Isu politik terhadap transmigrasi sering berkembang di kalangan para intelektual daerah dengan berbagai motif dan tujuan. Sumber konflik yang dapat mengganggu keserasian sosial pada umumnya berasal dari sumber daya yang terbatas atau diskriminasi akses terhadap sumber daya yang ada, perbedaan nilai orientasi budaya, tujuan yang bertolak belakang, dan perubahan yang terjadi. Pelly (1995) mengemukakan bahwa konstruksi etnis masing-masing pihak, frekuensi, dan intensitas interaksi sosial yang terjadi juga berpengaruh terhadap hubungan antartransmigran dan masyarakat asli. Konstruksi etnis yang berbeda menyebabkan proses akulturasi dan asimilasi berbeda pula. Frekuensi interaksi sosial dapat membantu tumbuhnya hubungan sosial seperti pertemanan, persahabatan, dan perkawinan. Cohen (1969) mengemukakan bahwa apabila etnik menjadi kategori sosial, seperti suku bangsa Jawa adalah Islam, Cina adalah penguasa ekonomi, Batak adalah Kristen progresif, Irian (Papua) adalah bodoh dan malas, maka konsep etnik tidak netral lagi sehingga telah mengandung unsur propaganda atau intimidasi.

KONDISI JARINGAN SOSIAL

Persoalan sosial yang selama ini dinilai luput dari perencanaan sosial adalah aspek jaringan sosial masyarakat. Jaringan sosial lintas ras (*race*), suku-bangsa, etnik, kedaerahan dan agama di lokasi-lokasi transmigrasi di Papua dinilai luput dari perhatian ilmuwan sosial dan budaya dalam program transmigrasi. Perencanaan jaringan sosial secara organik (ditumbuhkan) dan mekanik (direncanakan) tidak diperhatikan,

terabaikan, bahkan terlupakan, dibanding perhatian terhadap target kuantitas penempatan transmigran. Padahal pengembangan jaringan sosial menjadi tali perekat penting dalam masyarakat majemuk. Lemahnya jaringan sosial aspek pertanian lintas suku-bangsa menyebabkan proses difusi inovasi budi daya pertanian dari transmigran asal ke penduduk asli. Jaringan sosial aspek pertanian mendukung proses difusi inovasi budi daya pertanian terabaikan (La Pona, 1999). Rogers dan Shoemaker (1983) dan Epstein (1961) mengemukakan bahwa jaringan sosial adalah suatu pasangan hubungan khusus di antara kelompok orang tertentu, sedangkan sifat dari hubungan tersebut secara keseluruhan dipakai untuk menafsirkan perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat didalam hubungan. Masyarakat selain dipandang sebagai kumpulan orang juga merupakan sekumpulan hubungan antar anggotanya. Hubungan ini dapat berupa hubungan keluarga, famili, keturunan, persahabatan, pekerjaan, tetangga, dan hubungan sosial lain.

Perlunya pengembangan jaringan sosial dalam masyarakat majemuk ini, sebagaimana dikemukakan Fox (1985), dalam pergaulan antarindividu pada hampir semua masyarakat, baik yang amat sederhana maupun yang amat kompleks sifatnya selalu terdapat perbedaan derajat atau status. Timbulnya perbedaan pergaulan dalam individu menunjukkan stratifikasi hierarkis dalam satu masyarakat yang mendudukan seseorang pada posisi golongan rendah, menengah, dan atas, kaya dan miskin, pandai dan bodoh, kuat dan lemah, dan sebagainya. Setiap golongan membentuk gaya hidup dan adat kebiasaan yang khas serta sikap yang berbeda pula pada saat berinteraksi sosial dengan individu dari golongan atau status yang lain sehingga pergaulan antar individu baik dalam golongan yang sama maupun antar individu di luar golongan atau statusnya untuk dapat diakui keberadaannya diperlukan suatu adaptasi. Salah satu cara adaptasi untuk dapat bertahan di lingkungan yang lebih kompleks adalah memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki.

Jaringan sosial terjadi dalam masyarakat karena manusia pada hakikatnya tidak dapat berhubungan dengan semua manusia yang ada. Hubungan yang terjadi pada umumnya terbatas pada sejumlah orang tertentu. Setiap orang akan memilih dan mengembangkan hubungan sosial yang terbatas jumlahnya dalam suatu struktur sosial yang dapat digambarkan sebagai suatu perilaku yang *ajeg*, suatu keadaan menunjukkan gambaran hubungan antarorang seorang dan kedudukannya, menggambarkan adanya suatu perbedaan pelapisan sosial (Blau, 1975 dan Suparlan, 1988). Pelapisan sosial dianggap sebagai suatu ketimpangan, misalnya distribusi perbedaan kekayaan, status sosial dalam masyarakat, dan perbedaan lainnya. Tetapi, pelapisan sosial dapat juga diibaratkan sebagai organ tubuh manusia yang masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda (Lanski, 1966). Pada sisi lain ada pengelompokan dalam satuan kecil sampai satuan besar dalam satu wujud atau wadah atas dasar persamaan kepentingan, keyakinan, nilai, pendidikan, dan status sosial (Rogers dan Kincaid, 1981 dan Burt, 1987) sehingga kontak sosial antaranggotanya akan lebih mudah dan besar terjadi, apabila dibandingkan dengan orang yang mempunyai atribut yang tidak sama.

Jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat karena manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan dalam berhubungan dengan manusia lainnya (Boissevain dan Mitchell, 1972) sehingga mereka akan memilih untuk berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, agama, suku-bangsa, daerah asal, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya akan berhubungan dengan orang yang mempunyai jaringan *homophilly* (Rogers dan Burdge, 1972). Blau (1977) mengemukakan bahwa *homophilly* adalah sejauh mana pasangan-pasangan individu yang berinteraksi mempunyai kesamaan dalam beberapa atribut, seperti: kepercayaan (agama), suku-bangsa, kekerabatan, persaudaraan, dan kedudukan sosial. Kebalikannya, *heterophilly* adalah sejauhmana

individu-individu yang berinteraksi berbeda dalam berbagai ciri. Konsep ini diartikan sebagai pengelompokan sejumlah individu berdasarkan kepentingan, keyakinan, nilai, pendidikan, dan status sosial. Hubungan sosial yang telah terjalin tersebut akan dilanjutkan secara berlanjut dan berulang-ulang sehingga dengan demikian akan terjadi bahwa hubungan yang terjadi dengan orang yang mempunyai jaringan *homophily* akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang di luar jaringan tersebut. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari akan bertindak rasional, mereka akan memilih hubungan sosial yang paling menguntungkan.

Banyak aspek mempengaruhi berkembangnya jaringan sosial ini. Seperti dikemukakan Blau (1977), aspek *inequality* atau ketidaksamaan (perbedaan) status anggota kelompok masyarakat secara vertikal yang mengacu pada penggolongan status sosial dalam kaitannya dengan pendidikan, kekuasaan (*power*), umur, ketrampilan, dan intelegensia sebagai *graduated parameters*, serta aspek keanekaragaman (*heterogeneity*) antar kelompok masyarakat secara horizontal yang mengacu pada penyebaran (penggolongan) status anggota kelompok masyarakat, seperti: jenis kelamin, subu-bangsa, ras (*race*), agama, marga, pekerjaan, tempat bekerja, bahasa, status perkawinan, tempat tinggal, afiliasi politik, dan warganegara sebagai *nominal parameters* akan cenderung menjadi hambatan interaksi sosial antarkelompok masyarakat yang multietnik. Blau (1977) mengemukakan adanya proses interseksi (*intersecting nominal parameters*) akan meningkatkan interaksi sosial antaranggota kelompok etnik masyarakat, serta proses konsolidasi (*consolidated nominal parameters*) akan memperkuat pertalian (ikatan) sesama kelompok etnik masyarakat dan melemahkan hubungan sosial antarkelompok masyarakat etnik yang multietnik. Blau (1977) mengemukakan sifat atau karakter suatu masyarakat (*model personality*) masing-masing kelompok masyarakat, seperti: masyarakat tertutup, terbuka, terisolasi, tem-

peraman, dan etos kerja yang tinggi, turut pula mempengaruhi proses interaksi sosial antar-kelompok masyarakat etnik. La Pona (1999) menemukan translok yang memiliki jaringan sosial aspek pertanian dengan transmigran asal ternyata mengadopsi banyak inovasi budi daya pertanian, demikian sebaliknya.

Erat dan luasnya jaringan sosial lintas etnik mendukung pemantapan hubungan sosial antar etnik dan harmonisasi sosial. Bila saja hambatan dalam jaringan sosial itu dapat diminimalisasi maka bisa dipastikan proses interaksi sosial dan integrasi sosial masyarakat majemuk akan semakin baik pula. Nasikun (1992) bahwa mengemukakan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial silang-menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang-menyilang pula. Proses *cross-cutting affiliations* yang demikian telah menyebabkan konflik-konflik antarkelompok masyarakat tidak menjadi terlalu tajam. Konflik suku-bangsa, misalnya, akan direduksi oleh bertemunya loyalitas agama, daerah, dan pelapisan sosial dari para anggota suku-bangsa suku-bangsa yang terlibat di dalam pertentangan tersebut. *Cross-cutting affiliations* dan *cross-cutting loyalties* akan dan telah menyebabkan adanya hubungan-hubungan sosial antaranggota masyarakat yang multi-etnik sehingga Mitchel (1972) mengemukakan bahwa jaringan sosial lebih menitikberatkan pada karakteristik keterkaitan dari hubungan antarindividu dengan lainnya di dalam hal perilaku manusia di dalam masyarakat.

Selama ini penelitian jaringan sosial transmigran di Papua sangat terbatas dalam upaya perencanaan sosial-budaya secara mekanik maupun organik. La Pona (1999) dalam penelitiannya di lokasi transmigrasi Arso sebagai salah satu lokasi transmigrasi terbesar di Papua, menggunakan analisis data hubungan pada matrik dan sosiogram menunjukkan hubungan yang terjadi pada masing-masing kelompok masyarakat etnik tidaklah sama dengan hubungan yang mungkin dapat dicapai (terjadi) karena adanya suatu kenyataan bahwa

seseorang akan bertindak secara rasional, ia akan memilih dan melakukan hubungan dari sekian banyak hubungan yang dimiliki hanya pada hubungan sosial yang dipandang paling menguntungkan. Kuatnya hubungan dari masing-masing jenis kehidupan adalah dengan membagi jumlah hubungan yang terjadi dengan hubungan yang mungkin dapat terjadi, dan dalam penelitian ini adalah hubungan sosial aspek pertanian budi daya pertanian.

Penelitian yang melibatkan 7 (tujuh) etnik, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Wamena (Papua), Bali, Paniai (Papua), Sulawesi, Arso (Papua), dan Jawa, menemukan hubungan sosial untuk jenis kegiatan pertanian yang memperlihatkan bahwa keseluruhan hubungan yang terjadi dapat dikatakan sangat lemah sebab hubungan yang terjadi antara 299 orang responden hanya sebesar 530 hubungan atau sebesar 1,190 persen dari hubungan yang mungkin dapat terjadi sebanyak 44551 hubungan. Demikian juga, hubungan yang terjadi pada masing-masing kelompok etnik cukup lemah walaupun untuk kelompok masyarakat etnik Bali hubungan relatif lebih kuat dibanding kelompok etnik lainnya, karena disebabkan oleh sejumlah kemungkinan, artinya seseorang hanya melakukan hubungan pada hubungan yang paling menguntungkan, artinya dari sekian banyak hubungan, maka pertanian dianggap kurang terlalu penting, Jadi, seseorang pula dapat berhubungan dengan kelompok etnik lain di luar subjek penelitian dan bahkan dapat dengan orang-orang lainnya.

Hubungan sosial yang terjadi di luar kelompok masyarakat etnik masing-masing lebih banyak didasarkan pada adanya kesamaan agama sebagaimana terlihat pada kelompok etnik Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa dengan penduduk asli Arso, Wamena, dan Paniai karena kedekatan tempat tinggal (rumah), wilayah ladang (kebun), perkumpulan, dan persahabatan sebagaimana pada hubungan-hubungan yang terjadi antarkelompok etnik NTT, Jawa, dan Bali. Penggunaan tenaga kerja murah sebagaimana yang banyak terjadi pada kelompok etnik Sulawesi, Jawa,

dan NTT menggunakan jasa tenaga kerja anggota kelompok masyarakat etnik Wamena dan Paniai. Jaringan sosial aspek budi daya pertanian, yang juga merupakan bagian dari proses interaksi sosial antarkelompok masyarakat yang multi etnik dan multi kultural ini menunjukkan telah terjadi kontak sosial dan interaksi sosial antarkelompok masyarakat yang multi etnik walaupun proses interaksi antartransmigran dengan penduduk asli belum serasi sehingga kemudian mempengaruhi proses jaringan sosial aspek pertanian antarkelompok transmigran dan penduduk asli.

JARINGAN SOSIAL, DIFUSI, DAN ADOPTASI INOVASI

Terbatasnya jaringan sosial aspek budi daya pertanian menyebabkan lemahnya difusi inovasi budi daya pertanian dari transmigran asal ke penduduk asli, padahal sangat penting dalam upaya mempercepat perbaikan pertanian penduduk asli, sesuai tujuan pembangunan transmigrasi di Papua, mengakibatkan pertanian penduduk asli kurang berkembang, sekaligus menunjukkan proses difusi inovasi budi daya pertanian dipengaruhi oleh jaringan sosial aspek pertanian antarkelompok masyarakat. Temuan di atas sekaligus membuktikan dan menerima hipotesa bahwa difusi inovasi budi daya pertanian yang lintas etnik akan dipengaruhi oleh faktor kesamaan dan kesesuaian keyakinan dan kebudayaan pada masyarakat yang multi etnik dan multi kultural oleh karena jaringan sosial aspek pertanian akan lebih banyak berlangsung pada anggota dan kelompok masyarakat yang mempunyai kesesuaian keyakinan dan kepentingan. Perencanaan sosial dan budaya melalui jaringan sosial dan difusi inovasi budi daya pertanian tidak mendapat perhatian baik. Hal ini diakui oleh para perencana dan pelaksana program transmigrasi di Papua. Tidak banyak yang memahami bahwa difusi dan adopsi inovasi budi daya pertanian perlu direncanakan secara baik, karena perkembangan pertanian penduduk asli diantaranya ditentukan faktor tersebut. Asumsinya, transmigran asal dapat dan/atau harus

mendifusikan inovasi budi daya pertanian ke penduduk asli, dan proses difusi inovasi berkaitan erat dengan kondisi jaringan sosial lintas suku-bangsa, prinsipnya difusi inovasi dapat berlangsung dari satu individu ke individu lain dan dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat majemuk.

Difusi inovasi budi daya pertanian dipengaruhi kondisi jaringan sosial aspek budi daya pertanian. Dikemukakan Haggett (1972) dan Nystuen (1967) bahwa difusi ekspansi dibedakan dua jenis, yaitu (1) difusi menjalar adalah proses menjalarnya suatu inovasi terjadi karena kontak yang langsung antara manusia, melalui kontak sosial, komunikasi, dan interaksi sosial antarindividu atau kelompok-kelompok masyarakat; (2) difusi kaskade adalah proses penyebaran melalui beberapa tingkat atau hierarki. Terdapat pula faktor *carriers* atau "sipembawa" inovasi melalui proses, cara, dan model tertentu. Morrill (1965) dan Brown (1968) mengemukakan difusi perluasan merupakan penyebaran suatu inovasi dalam suatu masyarakat melalui proses komunikasi antara yang memiliki inovasi dengan individu yang tidak mengetahuinya, mengakibatkan jumlah yang memiliki inovasi tersebut semakin bertambah jumlahnya setiap waktu. Difusi penampungan terjadi karena perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain (program transmigrasi). Komunikasi inovasi pertanian antara transmigran dan penduduk asli merupakan bentuk proses difusi perluasan.

Perencanaan jaringan sosial yang tepat guna mendukung proses difusi dan adopsi inovasi budi daya pertanian sangat penting. Dikemukakan Linton (1936) bahwa proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan berlangsung dari satu teman ke teman lain, satu petani ke petani lainnya, satu keluarga ke keluarga lain, dari petugas lapangan ke para petani, atau dari satu kelompok masyarakat ke masyarakat lain yang multi-etnik dengan berbagai cara. Cara pertama adalah hubungan bentuk dari kebudayaan itu hampir tidak berubah (*simbiotik*) karena pengaruh-mempengaruhi yang lebih jauh tidak ada atau sangat minim, sedangkan cara lain adalah pemasukan secara

damai atau *penetration pacifique*. Eratnya hubungan jaringan sosial dan difusi dikemukakan Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa ada empat unsur utama dalam proses difusi inovasi, yaitu (1) sesuatu yang merupakan inovasi (budi daya pertanian); (2) saluran untuk mengkomunikasikan sesuatu inovasi; (3) waktu; (4) masyarakat sasaran sebagai suatu sistem sosial. Ia mengembangkan teori difusi model similar S-M-C-R-E atau *source* (sumber inovasi), *message* (pesan), *channel* (saluran inovasi), *receiver* (penerima inovasi), dan *effects* (akibat yang ditimbulkan) yaitu menolak dan mengadopsi inovasi. Rogers dan Shoemaker (1971) mengemukakan bahwa sumber suatu inovasi dapat berasal dari inovator itu sendiri, kalangan penyuluh lapangan, dan antar-masyarakat. Pesan yang dibawakan berkaitan dengan sesuatu inovasi (budi daya pertanian), kemudian disebarluaskan agar masyarakat bersedia menerima. Pesan-pesan dapat disampaikan melalui hubungan komunikasi interpersonal serta sasaran penerima inovasi adalah masyarakat sebagai anggota suatu sistem sosial.

Penduduk asli dalam menerima inovasi budi daya pertanian memang tidak serta merta langsung menerima begitu saja karena terdapat proses-proses penyebarluasan suatu inovasi. Sebagaimana dikemukakan Rogers dan Shoemaker (1971), dalam menyebarluaskan sesuatu inovasi, akan melalui lima tahapan, adalah (1) timbulnya kesadaran akan perlunya ide baru tersebut; (2) individu tertarik untuk mengembangkan ide-ide baru dan berupaya mencari informasi; (3) menilai apakah ide-ide baru itu akan bermanfaat ataukah sebaliknya dan setelah itu muncul keputusan untuk menerima atau menolak; (4) mulai mencoba-coba dalam skala kecil apakah hasilnya memadai atau sebaliknya; dan (5) jika menguntungkan, ia akan menerima. Inovasi yang telah diterima belum tentu seterusnya diadopsi karena dapat kemudian menolaknya. Rogers dan Shoemaker (1983) mengemukakan bahwa ada lima faktor yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam adopsi inovasi pada suatu masya-

rakat tradisional, adalah (1) *relative advantage* atau keuntungan relatif; (2) *compatibility* yakni sejauh manakah inovasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman yang ada; (3) *complexity* atau tingkat kerumitan dalam mempelajari dan mempraktekkan inovasi; (4) *trialability* atau kesempatan untuk mencoba sesuatu inovasi dalam skala terbatas; dan (5) *observability* atau cepat tidaknya sesuatu hasil dari inovasi dapat dilihat atau dibuktikan oleh anggota masyarakat penerima inovasi. Dixon (1982) mengemukakan bahwa determinan terhadap difusi dan adopsi inovasi, adalah (1) adanya prasangka inter-personal; (2) pandangan yang terbatas; (3) sikap terhadap penguasa; (4) peranan individual terhadap tercapainya tujuan keluarga; (5) kelemahan menerima inovasi; (6) fatalisme; (7) kelemahan aspirasi; (8) kelemahan untuk menunda kepuasan; (9) keterbatasan pandangan tentang dunia luas; (10) kelemahan berimpati; (11) kurang berpikir kritis; dan (12) sistem sosial budaya.

Beragamnya hambatan difusi inovasi budi daya pertanian juga dikemukakan Foster (1980) bahwa hambatan dalam inovasi adalah (1) hambatan budaya yang berkaitan dengan sistem nilai, perilaku, sikap, norma, dan kepercayaan; (2) hambatan sosial yang berkaitan dengan hubungan sosial antar individu; (3) inovasi tersebut bertentangan dengan pranata sosial yang ada; dan (4) hambatan psikologis yang berkaitan dengan cara penyampaian pesan inovasi. Rogers & Shoemaker (1971) mengemukakan bahwa aspek ekonomik sebagai penghalang, dan mengemukakan tahapan pengambilan keputusan dalam suatu inovasi, yaitu; tahap pengenalan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Menyangkut penerimaan inovasi pertanian, Kober (1984) mengemukakan pentingnya arti faktor "insentif", yakni masyarakat harus merasakan kebutuhannya dapat dipenuhi, dan mudah diintegrasikan dalam kebudayaannya. Sifat penerimaan selalu selektif, dan kemudian direinterpretasikan sesuai dengan struktur dan nilai kebudayaan yang berlaku. Rogers dan Shoemaker (1971) mengemukakan inovasi akan lebih

mudah diterima pada masyarakat yang memiliki suatu sistem sosial budaya modern, dan demikian sebaliknya. Sistem sosial modern itu adalah (1) memiliki sikap yang positif terhadap perubahan; (2) teknologinya berkembang dengan baik dan terdapat pembagian pengetahuan; (3) memberi penilaian amat tinggi terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) pola berfikirnya rasional dan hubungan sosial lebih didasari aspek hubungan kepentingan daripada hanya perasaan; (5) memiliki jangkauan perspektif dan hubungan luas; dan (6) memiliki rasa empati yang sangat dalam dan bersedia menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan bersama.

Sehubungan dengan sulitnya penduduk asli (masyarakat tradisional) untuk menerima suatu inovasi dibanding masyarakat yang lebih maju budayanya, Gonzalez (1988) mengemukakan penolakan terhadap suatu inovasi, seharusnya tidak dianggap sebagai gejala keterbelakangan sebab pengambilan keputusan untuk menerima ataukah menolak inovasi, biasanya bukan merupakan sesuatu yang mutlak melainkan dapat berupa keputusan relatif dalam kurun waktu tertentu. Poerwanto (1996) mengemukakan bahwa unsur kebudayaan material lebih mudah diterima dibanding non material, dan memiliki manfaat besar pada kebudayaan penerima akan mudah diadopsi. Unsur-unsur kebudayaan yang sangat sukar diganti adalah (1) memiliki fungsi terjaring luas dalam suatu masyarakat; (2) yang telah dipelajari seseorang pada awal sosialisasinya; dan (3) berkaitan dengan kepercayaan atau religi.

Proses penerimaan suatu inovasi (pertanian) melalui tahapan-tahapan tertentu. Ratzel (1893) mengemukakan bahwa masuknya satu unsur kebudayaan asing akan menyebabkan pula berubahnya unsur-unsur lainnya yang pada akhirnya dapat menggoncangkan keseimbangan pada kebudayaan itu. Unsur baru itu biasanya tidak sekaligus diterima semua warga masyarakat melainkan merupakan milik segolongan kecil masyarakat saja. Dalam perkembangan selanjutnya unsur kebudayaan itu akhirnya secara permanen telah ditempatkan

dalam struktur kebudayaan yang didatangi, dan terjadilah satu integrasi dalam kebudayaan. Menurut Nystuen (1967) dan Abler (1971), faktor penghambat difusi inovasi menyebabkan kekuatan penyebaran tidak berlangsung lancar. Faktor sarana dan prasarana transportasi mengakibatkan penyebaran inovasi tidak mudah untuk semua tujuan karena hambatan fisik, seperti; jarak, hutan, pegunungan, dan rawa-rawa. Selain itu Nystuen (1967) dan Morrill (1968) mengemukakan bahwa perbedaan nilai, norma, dan sistem sosial, prasangka, stereotip etnik, persepsi, bahasa, agama, afiliasi politik, psikologi, dan intensitas komunikasi, merupakan hambatan penyebaran inovasi dalam masyarakat yang majemuk. Menurut Feagin dan Feagin (1978) adanya prasangka, stereotip, isu ras (*race*), dan rasial kelompok dalam masyarakat majemuk akan mempengaruhi hubungan sosial antarkelompok etnik itu.

Selama terdapat kontak sosial dan komunikasi sosial antarkelompok multietnik itu, maka akan berlangsung difusi inovasi dalam berbagai taraf. Koentjaraningrat (1970) mengemukakan bahwa sebanyak 90 persen isi setiap kebudayaan berasal dari proses peniruan. Bahwa orang tidak pernah meniru semua inovasi yang ada, tetapi menerapkan selektif yang ketat dengan membatasi pilihan mereka kepada apa yang dapat disesuaikan dengan kebudayaan yang ada. Linton (1936) dan Kroeber (1984) mengemukakan bahwa tendensi untuk meniru kebudayaan asing begitu besar. Inovasi yang ditirunya juga dapat menimbulkan modifikasi pada budaya yang sudah ada. *Etnosentrisme* kebudayaan dapat pula menjadi hambatan untuk menerima inovasi dari luar oleh karena dalam suatu masyarakat selalu bekerja kekuatan yang ingin menerima dan menolak perubahan. Perubahan yang berasal dari dalam masyarakat ditimbulkan oleh *discovery* atau setiap penambahan ilmu pengetahuan atau penemuan baru dan *invention* adalah penerapan penemuan baru itu.

Salah satu prinsip difusi inovasi adalah inovasi itu pertama-tama akan diambil oleh masyarakat (penduduk asli = translok) yang

paling dekat hubungannya dari sumbernya (transmigran dasar), dan kemudian oleh masyarakat yang letaknya lebih jauh. Semakin jauh penyebaran unsur kebudayaan dari pusatnya (lingkungan sosial transmigran dasar), maka makin kabur sifatnya dan unsur itu banyak mengalami perubahan dalam bentuk dan isinya. Kroeber (1984) mengemukakan bahwa suatu difusi melalui jarak yang jauh biasanya terjadi melalui suatu rangkaian pertemuan antara suatu deret suku-suku bangsa. Bersamaan dengan rangkaian pertemuan tadi unsur kebudayaan dapat didifusikan dari A ke B, ke C, ke D, dan demikian seterusnya. Bahwa dalam zaman modern sekarang ini difusi inovasi berlangsung dengan cepat sekali, bahkan sering kali tanpa kontak langsung karena adanya penyiaran yang sangat efektif. Koentjaraningrat (1986) mengemukakan proses difusi tidak hanya dari Bergeraknya inovasi dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi terutama inovasi itu dibawa oleh individu-individu dari kebudayaan lain. Inovasi itu selalu berpindah-pindah, sebagai suatu gabungan atau suatu kompleks yang tidak mudah dipisahkan.

Berbagai teori dan temuan di atas menunjukkan proses difusi dan adopsi dipengaruhi banyak faktor penghambat (*barriers*), tetapi faktor jaringan sosial lintas ras (trans. dasar >< translok) memegang peran penting dan menentukan. Difusi inovasi budi daya pertanian lintas etnik dalam masyarakat majemuk dapat berlangsung melalui berbagai kontak sosial dan komunikasi dalam berbagai proses, taraf, dan hambatan. Berkembangnya jaringan sosial akan mempermudah proses difusi inovasi dari transmigran dasar ke translok, mengakibatkan perubahan (perkembangan) budaya pertanian translok sebagai penerima inovasi. Perencanaan sosial-budaya spesifik yang berkaitan dengan pengembangan jaringan sosial sebagai upaya pengembangan difusi inovasi selama ini dinilai kurang mendapat perhatian para perencana sosial dan budaya program transmigrasi di Papua. Berbagai pedoman pelaksanaan transmigrasi tidak ditemukan perencanaan

sosial-budaya menyangkut pengembangan jaringan sosial dan difusi inovasi ini.

Pengembangan budaya pertanian penduduk asli dipahami memang kompleks dan beragam, misalnya perubahan tidak dapat meluas apabila penggunaan inovasi itu (baca: budi daya pertanian) akan mendapat "hukuman", sulit diintegrasikan di dalam pola kebudayaan, masyarakat menentang perubahan, menentang tipe perubahan tertentu saja, sudah puas dengan keadaan yang ada, dan beranggapan sumber perubahan tersebut tidak tepat. Adiwoso (1994) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan adalah pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, keinginan maju, toleransi terhadap perubahan yang menyimpang, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, disorganisasi dalam masyarakat, dan sikap mudah menerima hal baru. Faktor penghalang adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya *vested interest*, berprasangka buruk terhadap hal baru, dan rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan.

Perubahan atau perkembangan taraf budaya pertanian translok sesungguhnya sudah berlangsung, hanya proses dan sifatnya lambat sehingga tidak bisa dikatakan gagal atau tidak ada perkembangan, sebagaimana pandangan beberapa pihak. Persoalannya adalah kemajuannya tidak sebagaimana diharapkan berbagai pihak. Sehubungan dengan upaya memahami perubahan budaya pertanian translok, Rogers dan Kincaid (1981) dan Bertrand (1980) mengemukakan bahwa perubahan dapat diketahui apabila dilakukan perbandingan keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu, membandingkannya dengan masa lalu, faktor apa yang mengalami perubahan itu, sejauh manakah perubahan terjadi, bagaimana kecepatan perubahan itu berlangsung, kondisi apa yang terdapat sebelum dan sesudah perubahan terjadi, apakah yang terjadi selama transisi itu, stimulus apakah yang mendorong

terjadinya perubahan itu, melalui mekanisme apakah perubahan terjadi, unsur apakah yang menimbulkan stabilitas pada suatu titik tertentu di dalam perubahan, dan dapatkah manusia menentukan arah dari perubahan itu.

SIMPULAN

Perencanaan sosial-budaya dalam program transmigrasi yang belum dilakukan secara baik mengakibatkan mengemukanya persoalan sosial, khususnya sangat lemahnya jaringan sosial aspek budi daya pertanian lintas ras dan suku-bangsa. Perkembangan budi daya pertanian penduduk asli di lokasi transmigrasi sudah ada, tetapi berlangsung lambat. Perencanaan jaringan sosial aspek pertanian yang tepat dapat mendukung pengembangan difusi dan adopsi inovasi budi daya pertanian pada penduduk asli. Budaya pertanian penduduk asli yang masih tertinggal jauh dibanding transmigran asal perlu mendapat perhatian utama dalam upaya mempercepat perbaikan kesejahteraan penduduk asli. Pengembangan program transmigrasi era otsus di Papua perlu lebih memperhatikan manfaatnya bagi penduduk asli yang memiliki taraf kehidupan masih rendah. Apabila program ini dapat memberikan keuntungan bagi penduduk asli, dipastikan akan didukung dan diterima secara baik oleh penduduk asli. Peran ilmuwan sosial dan budaya sangat dibutuhkan dalam mewujudkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abler, et al., 1971. *Spatial Organization: The Geographer's View of The World*. New Jersey: Prentice, Hall., Englewood Cliffs.
- Adiwoso, R. Suprpto. 1994. "Keseserasian Antara Pendetang dan Penduduk Asli : Suatu Alternatif Model". Makalah pada seminar nasional Membangkitkan Budaya Kepoloporan Dalam Mobilitas. Jakarta: Dep. Transmigrasi dan PPH.
- Bertrand, Alvin L. 1980. *Sosiologi*. Alih bahasa Sanapiah S, Faisal. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Blau, Peter M. 1975. *Equality and Heterogeneity, A Primitive Theory Social Structure*. New York: The Free Press, A. Division of Mac Millan Publishing, Co.
- . 1977. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.

- Boissevain, Jeremy dan Mitchell, Clyde. J. 1972. *Network Analysis Studies in Human Interaction*. Paris: Mouton, the Hague.
- Brown, Lawrence A. 1968. *Diffusion Dynamic. Land Studies in Geography*, Series B, No.29. Lund: Gleerup.
- . 1968. *Diffusion Processes and Location*. Regional Science Research Institute Bibliography Series No.4. Philadelphia.
- Burt, Ronalds S. 1987. "A Note on Strangers, Friends and happiness" dalam *Social Network*. 9 (4). December.
- Cohen, Yehudi A. 1969. "Social Boundary Systems". *Current Anthropology*. Vol. 10. No. 1. February 1969.
- Coser, Lewis A. 1972. "Conflict : Social Aspect". *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 3. London: McMillan Company & The Free Press.
- Dixon, G. 1982. "A Course Manual in Agricultural and livestock Extension." *Rural Sociology*. Vol. 1. Melbourne: Australian Vice Concellor.
- Epstein, A.L. 1961. "The Network and Urban Social Organization". *Rhodes Livingston Journal*, hal.29-31.
- Feagin, J.R dan Feagin, C.B. 1978. *Racial and Ethnic Relations*. Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Foster, G.R. 1980. *Applied Anthropology*. Boston: Lettle Brown and Company.
- Fox, James. 1985. "Dimensi Waktu Dalam Penelitian Sosial: Suatu Studi Kasus Di Pulau Rote". Dalam Koentjaraningrat; Donald K. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta.
- Guiness, P. 1982. "Perlunya Suatu Pendekatan Baru." Dalam: Joan Hardjono. Ed. *Transmigrasi : dari Kolonisasi ke Swakarsa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Haggett, P. 1972. *Geography: A Modern Synthesis*. London: Harper and Low.
- Heeren, H. J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. terj. Hans Daeng & Willie Koen. Jakarta: PT Gramedia.
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Koentjaraningrat. 1970. *Keragaman dan Keanekaragaman Masyarakat Irian Barat*. Jakarta: LIPI.
- . 1982. "Masalah Integrasi Nasional." Dalam: Koentjaraningrat, ed. *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- . 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Krober. 1984. *Anthropology*. New York: Harcourt, Brace and Company, hal. 368-370..
- Kustadi. 1983. *Transmigrasi dan Tanahnya*. Salatiga: Univ. Kristen Satya Wacana.
- La Pona. 1999. "Difusi Inovasi Budi daya Pertanian dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Studi Kasus Di Lokasi Transmigrasi Arso Kabupaten Jayapura Provinsi Papua". Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lenski, Gerhard E. 1966. *Power and Privelege*. New York: McGraw Hill Company.
- Linton. 1936. *The Study of Man*. New York: The Free Press.
- Michel J, Clyde. 1972. "Networks, Norms and Institutions." Dalam Jeremy Boissevain and J.Clyde Mitchell. *Network Analysis Studies in Human Interaction*. Paris:Mouton The Hague.
- Morrill, Richard. 1968. "Waves of Spatial Diffusion" *Journal of Regional Science*, VIII. hal. 1-18.
- Nasikun. J. 1992. *Sistem Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 1999. "Di Bawah Pohon Beringin". Makalah, di Lokakarya "Formulasi Masalah-Masalah Strategis Dalam Kajian Hukum Di Indonesia: Sebuah Upaya Reposisi Supremasi Hukum". PMB-LIPI. tanggal 25-27 Februari 1999. Jakarta.
- Nystuen, J.D. 1967. "Boundary Shapes and Boundary Problem." *Peace Research Society Paper*, VIII. hal. 28-107.
- Pelly Usman. 1995. "Keseserasian Manusia Pendatang dengan Lingkungan Tujuan". Makalah; pada seminar nasional "Membangkitkan Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas". Dep. Transmigrasi dan PPH. Jakarta.
- Poerwanto Hari. 1996. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada dan Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yogyakarta.
- Ratzel. 1893. "Beitrage zur Kenntniser der Verbreitung des Bogens und Des Speeres in Indo-Afrikanischen Volkerkreis, Dalam Koentjaraningrat. 1958. *Beberapa Metode Antropologi Dalam Penyelidikan, Masyarakat dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Roger J. E.M. and Shoemaker, Floyd F. 1971. *Difusion of Innovation*. 3rd ed. New York: Free Press.
- Rogers, Everet M and Shoemaker, Floyd F. 1983. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru, disarikan oleh Abdillah Hanafi*). Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Rogers, Everett. M. & Kincaid, D. Lawrence. 1981. *Communication Network. Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Rogers, Everett M. and Burdige, Rabel J. 1972. *Muck Vegetable Growers: Diffusion of Innovation among Specialized Farmers*. Wooster: Ohio Agri. Exp. Sta., Res. Ohio.

Rumbiak M. dan Manning C. 1989. *Economic Development, Migrant Labour and Indigenous Welfare in Irian Jaya 1970-1984*. The National University Center for Development Studies Pacific Research Monograph No.20.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soetrisno, Lukman. 1986. "Transmigrasi dan Perubahan Budaya: Sebuah Refleksi 90 Tahun Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Indonesia." Dalam: Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad. *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspa Swara.

Suparlan, Parsudi. 1988. "Transmigrasi dan Transformasi Budaya." Dalam Muhajir Utomo dan Ahmad Rofiq. *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspa Swara.

Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.

Undang-Undang RI. No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Weber, Max. 1978. *Economy and Society*. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: Univ. Of California Press.

Yahya, Yunus. 1983. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamsyah.